

**EDUKASI TATA KELOLA KEUANGAN DALAM MEWUJUDKAN  
KESEJAHTERAAN KEUANGAN (*FINANCIAL WELFARE*)  
DI BPN PROVINSI BALI**

***FINANCIAL GOVERNANCE EDUCATION IN REALIZING FINANCIAL  
WELFARE AT BPN BALI PROVINCE***

**Ni Made Ayu Trisnayanti Kusuma<sup>1\*</sup>, Kadek Devi Kalfika Anggria Wardani<sup>2</sup>,  
Anak Agung Ngurah Eddy Supriyadinata Gorda<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Nasional

<sup>2</sup>Universitas Pendidikan Nasional

\*Email: ayukusumaixb10@gmail.com

(Diterima 29-08-2022; Disetujui 20-09-2022)

**ABSTRAK**

Salah satu aspek yang ingin dicapai Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali yakni kesejahteraan keuangan. Dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan dapat berupa edukasi tata kelola keuangan dan pemberdayaan terhadap pegawai BPN. Dimana pemerintah harus mampu melaksanakan amanat rakyat berupa penyediaan informasi keuangan yang jujur dan terbuka kepada publik. Tujuan dari edukasi tata kelola keuangan adalah untuk mengetahui akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan di Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, serta memberikan pelayanan publik yang baik. Setelah melakukan observasi dan perencanaan kegiatan, dilanjutkan dengan pemberian edukasi literasi keuangan berupa sosialisasi dan pemberian poster untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan SDM dan pegawai BPN akan paham pentingnya melek finansial. Edukasi yang telah diberikan mampu bermanfaat dan diterima oleh berbagai pihak, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan keuangan baik di lingkungan internal maupun eksternal. Diharapkan edukasi ini dapat dilaksanakan secara berkala agar kepercayaan semakin meningkat.

Kata kunci: akuntabilitas, keterbukaan, pemberdayaan, tata kelola keuangan, dan kesejahteraan keuangan

**ABSTRACT**

*One aspect that the National Land Agency of Bali Province wants to achieve is financial welfare. In realizing financial welfare need financial governance education and empowerment of employees also the community. Where the government should be able to provide all financial information honestly and openly to the public in order to carry out the people's mandate. The purpose of financial governance education is to determine accountability, openness, and empowerment in realizing financial welfare and be able to improve a good image to the public. After observing and planning activities, the provision of financial literacy education in the form of socialization and the provision of posters to improve the quality of Human Resources and make the public understand the importance of financial literacy. The education that has been provided is able to be useful and accepted by many people, so can realize financial welfare both in the internal and external environment.*

*Keywords: accountability, openness, empowerment, financial governance, and financial welfare*

**PENDAHULUAN**

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali sebagai mitra kegiatan pengabdian berada di bawah naungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian ATR, Kementerian ATR mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Berdasarkan penelitian Hidayah, Indonesia merupakan negara ketiga setelah India dan Cina yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah dari seluruh

dunia, yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan. Tingkat literasi keuangan yang tinggi dibutuhkan agar terhindar dari masalah keuangan. Sehingga memiliki literasi keuangan yang tinggi sebagai hal yang vital untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera (Hidayah et al., 2021). Literasi keuangan adalah edukasi yang dimiliki oleh seseorang sebagai pengelola keuangan untuk menaikkan derajat kesejahteraan hidup, keputusannya dapat berdampak pada masyarakat, negara, dan ekonomi secara global (Atik Atikah, 2020).

Tata kelola (*money management*) adalah sebuah kegiatan pengelolaan dana oleh individu atau kelompok bertujuan untuk memperoleh kesejahteraan keuangan (*financial welfare*), sehingga perlunya pengelolaan keuangan yang baik agar terjaga dan sesuai dengan kebutuhan (Atik Atikah, 2020). Laporan keuangan pada mitra kegiatan BPN Provinsi Bali penting dikelola dengan baik, efisien, transparan, efektif, ekonomis, dan akuntabel yang menjadikan sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya (Ferizal & Ikhbar, 2022).

Transparansi tata kelola keuangan publik adalah keterbukaan (*openness*) dalam prinsip *good governance* yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik dimana penting bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan guna memberikan informasi terkait aktivitas pengelolaan sumber daya publik. *Horizontal accountability* tercipta karena adanya transparansi antara pemerintah daerah dengan masyarakat yang menciptakan pemerintah daerah responsif terhadap aspirasi masyarakat (Iznillah et al., 2018). *Good governance* yang diterapkan pemerintah bertujuan menciptakan pendaftaran tanah yang sederhana, terjangkau, aman, mutakhir, dan terbuka (Butarbutar et al., 2022).

Berdasarkan penelitian Nasriani menyatakan bahwa pentingnya akuntabilitas tinggi sebagai acuan kerja sama antara aparat baik antara atasan dan bawahan dengan mampu berkomunikasi dengan baik (Nasriani et al., 2021). Hasil observasi lapangan bahwa pengelolaan keuangan tidak sepenuhnya terbuka karena kurangnya media massa yang ada pada mitra kegiatan BPN Provinsi Bali, yang membuat tidak mengetahui tata kelola keuangan dan timbul adanya rasa kurang percaya terhadap pelayanan publik. Dalam terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan melalui akses informasi pada keuangan yang ada pada mitra kerja guna mewujudkan kesejahteraan keuangan (*financial welfare*) dimana penting adanya informasi keuangan relevan secara terpercaya dan transparan kepada publik (Fajarudin, 2021).

Oleh sebab itu, tim pengabdian melakukan pengabdian dengan mengangkat judul “Edukasi Tata Kelola Keuangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keuangan (*Financial Welfare*) di BPN Provinsi Bali” Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan pegawai BPN, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik kedepannya bagi pemerintah daerah dan pegawai BPN.

## BAHAN DAN METODE

Pemangku kepentingan dari pegawai BPN yang paling utama guna mewujudkan kesuksesan suatu pemerintahan. Kepercayaan publik dapat dikaitkan dengan teori *Behavioral belief*. *Behavioral belief* merupakan yakinnya suatu individu pada perilaku dan evaluasi terhadap hasil dari keyakinan yang dapat membentuk variabel sikap (*attitude*) (Paot, 2022). Kepercayaan publik terbangun dari apa yang publik rasakan, lihat, dan dengar atas segala bentuk pemerintahan yang ada. Faktor pembentuk utama kepercayaan publik adalah akuntabilitas, keterbukaan, dan pengadaan dalam tata kelola keuangan BPN Provinsi Bali. Sehingga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan keuangan (*financial welfare*) di mitra kegiatan Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali melalui edukasi akan pentingnya aspek akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan dalam tata kelola keuangan (Ningtyas, 2018).

Karakteristik kualitas laporan keuangan perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat terpenuhinya suatu tujuan. Laporan keuangan yang berkualitas memiliki karakter relevan, dapat dipahami, materialitas serta andal (Riza Kurniawan, 2020). Aspek keterbukaan ini bisa dimulai dari rencana anggaran, pemilihan tim pengabdian, melakukan rencana program, alokasi dana, serta evaluasi program tersebut (Chusanudin & Ramadhan, 2022). Keterbukaan informasi publik seharusnya diterapkan dalam setiap staf atau pegawai, dengan adanya keterbukaan informasi pada badan publik, para elit atau pegawai menjadi memiliki tanggung jawab terhadap apa yang mereka kerjakan. Hal tersebut sangat mendukung untuk menciptakan pemerintah yang transparan dan akuntabel (Ivana & Kurniawan, 2022). Laporan keuangan untuk membantu *top management* di dalam proses pengambilan suatu keputusan (Deden Sopandi et al., 2022).

Pertama adanya observasi yang dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah yang terdapat di mitra kerja. Dimana berdasarkan hasil observasi lapangan pengelolaan keuangan belum cukup terbuka dan akuntabel. Perlunya edukasi yang bertujuan agar meningkatkan citra pelayanan publik. Khalayak sasaran adalah pegawai BPN yang kurang paham dan belum sepenuhnya percaya terkait laporan keuangan mitra kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali. Kemudian ditelusuri rumusan masalah terkait pengabdian, dan dilanjutkan mencari studi literasi tata kelola keuangan untuk bahan



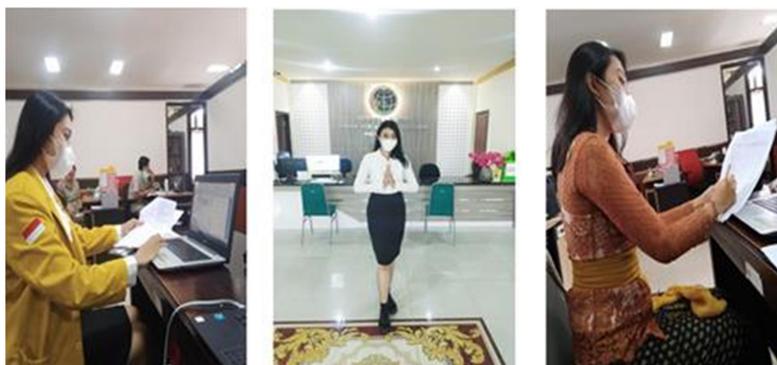
## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dimulai tanggal 4 Juli sampai dengan 2 September 2022 dilakukan dengan mitra kegiatan BPN Provinsi Bali. Kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan pegawai BPN banyak, khususnya pegawai BPN yang masih awam terkait bagaimana Tata Kelola Keuangan dalam upaya mewujudkan *financial welfare* serta pentingnya pemberdayaan pegawai.

Metode yang digunakan dalam mengimplementasikan edukasi tersebut dalam upaya mengoptimalkan minat baca terhadap literasi keuangan adalah dengan sosialisasi dengan pegawai BPN melalui *Zoom* untuk mempermudah pegawai memperoleh wawasan dimanapun juga. Penyebaran poster edukasi merupakan salah satu metode yang efektif dalam menyampaikan edukasi literasi.

### 1. Observasi dan Wawancara

Setelah acara pelepasan tim pengabdian dari kampus pada Sabtu, 2 Juli 2022, observasi dilakukan dengan melakukan janji kepada *stakeholder* dan pegawai BPN serta Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali, dimana janji wawancara dilakukan pada Senin, 4 Juli 2022 pukul 07.00 wita. Wawancara bersama Kepala Sub Bagian Keuangan Tata Usaha BPN Provinsi Bali. Salah satu masalah yang belum maksimal solusinya adalah mengenai masalah Tata Kelola Keuangan untuk mewujudkan *financial welfare* agar pegawai BPN percaya mengenai keuangan pelayanan publik.



Gambar 2. Observasi dan Wawancara

### 2. Tahapan Kegiatan

Dalam tahapan ini, kegiatan dilakukan melibatkan beberapa pihak seperti *stakeholder* dan pegawai BPN.

#### a. Kunjungan ke BPN Provinsi Bali

Kunjungan pertama dilakukan observasi dan wawancara dilakukan serta janji bertemu dengan staf yang berada di loket BPN Provinsi Bali pada tanggal 10 Juli 2022, dimana

pertemuan dilakukan mentaati protokol kesehatan covid-19. Dari hasil pertemuan dapat disimpulkan bahwa selain melibatkan langsung semua *stakeholder* serta pegawai BPN untuk melaksanakan program kerja kedepannya, yakni:

1. Sosialisasi melalui *zoom*, live instagram, dan penyebaran poster edukasi di masing-masing titik BPN Provinsi Bali dan banjar agar mudah dijangkau oleh pegawai BPN.
2. Melibatkan *stakeholder* dan mitra kerja dalam menyukseskan program kerja tersebut.
3. Edukasi ke pegawai BPN terkait pentingnya tata kelola keuangan dalam mewujudkan *financial welfare* dengan meningkatkan minat baca melalui literasi keuangan.
4. Pembuatan *telegram group* untuk menginformasikan terkait adanya webinar tata kelola keuangan dan dipastikan program kerja tersebut berjalan lancar dan berkelanjutan.

**b. Penentuan Lokasi dan Penyebaran Poster Edukasi**

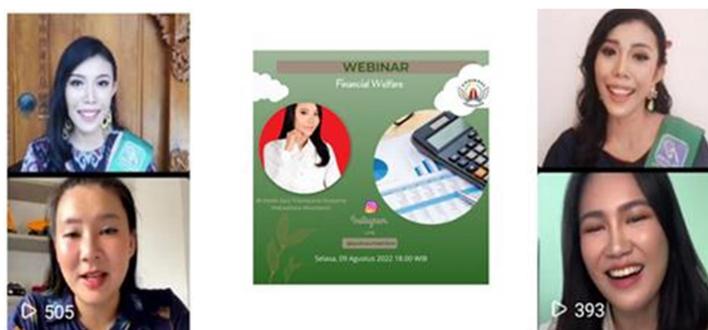
Dari hasil koordinasi dan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, penyebaran poster edukasi dilakukan di 5 titik BPN Provinsi Bali, yaitu di Aula, P2, Pengadaan Tanah, Tata Usaha, dan loket. Dimana berisikan himbauan 6 tahapan mudah untuk mengelola keuangan, sebagaimana terlihat pada Gambar 3.



**Gambar 3. Poster Edukasi**

**c. Edukasi Tata Kelola Keuangan Melalui Live Instagram**

Media sosial instagram dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi melalui fitur live. Tidak sedikit *following* yang ikut serta berpartisipasi dalam kegiatan live materi tata kelola keuangan dilihat dari antusias mereka dalam diskusi tanya jawab melalui kolom komentar.



**Gambar 4. Edukasi Tata Kelola Keuangan Melalui Live Instagram**

#### d. Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom

Dalam mewujudkan kesejahteraan keuangan (*Financial Welfare*) di mitra kerja BPN Provinsi Bali bisa diterapkan dengan adanya lima indikator literasi keuangan, sebagai berikut:

- Pengetahuan keuangan (*Financial Knowledge*) yaitu pertanyaan terkait dengan pengetahuan umum keuangan yang penting untuk diketahui.
- Sikap keuangan (*Financial Attitude*). Sikap keuangan yaitu pertanyaan berorientasi pada keamanan uang.
- Perilaku keuangan (*Financial Behavior*), yaitu pertanyaan terkait dengan konsep organisasi keuangan.
- Pelatihan Keuangan (*Financial Training*) yaitu pertanyaan berorientasi pada keuangan pribadi, utang, pendapatan dan tabungan.
- Keterampilan keuangan (*Financial Skill*), yaitu pertanyaan berorientasi dalam menghitung produk dan jasa lembaga keuangan, seperti bunga (tabungan atau pinjaman) (Atik Atikah, 2020).

Literasi keuangan penting sebagai fundamental dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas keuangan (Kusuma et al., 2022). Flyer Webinar Literasi Keuangan di *upload* pada sosial media seperti instagram @ayukusumaatrisna, ketika kegiatan berlangsung tanggal 18 agustus 2022 pukul 18.00 wita – selesai, terdapat kuis yang membantu pegawai BPN untuk melek finansial.

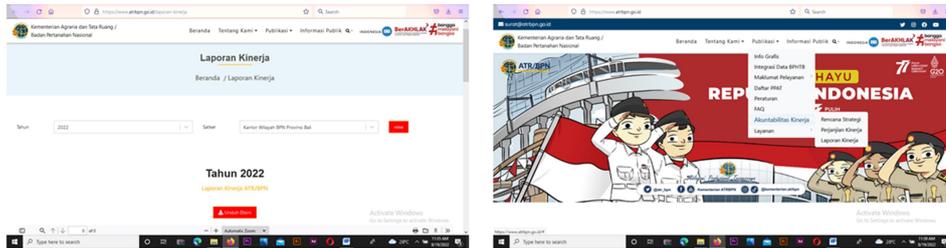


Gambar 5. Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom

#### e. Media Konsultasi Telegram Group

*Telegram Group* digunakan untuk menjaga agar edukasi terkait tata kelola keuangan antar pegawai BPN terus berlanjut. Informasi seputar webinar, seminar nasional, seminar internasional, dan lain-lain dapat di *share* pada grup tersebut. Sehingga memudahkan pegawai BPN untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan mendapatkan informasi secara online. Selain itu, saran untuk membangun Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali juga dapat dikoordinasikan melalui telegram group tersebut, kini transparansi Laporan

Kinerja yang berisikan Laporan Keuangan dapat diakses dan diunduh pada website <https://www.atrbpn.go.id/laporan-kinerja> sebagai berikut:



**Gambar 6** Transparasi Laporan Kinerja BPN Provinsi Bali

## f. Evaluasi Kegiatan

Tahap selanjutnya adalah evaluasi oleh tim pengabdian atas kegiatan yang dilakukan. Berikut merupakan hasil evaluasi sebelum dan sesudah dilakukannya edukasi:

**Tabel 1. Evaluasi Kegiatan**

No.	Agenda Kegiatan	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1.	Penyebaran Poster Edukasi.	Mitra kerja belum memiliki sarana untuk mensosialisasikan Tata Kelola Keuangan dalam mewujudkan <i>Financial Welfare</i> .	Mitra kerja sudah memiliki sarana untuk mensosialisasikan Tata Kelola Keuangan dalam mewujudkan <i>Financial Welfare</i> .
2.	Edukasi Tata Kelola Keuangan Melalui Live Instagram.	Pegawai BPN belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya Tata Kelola Keuangan, sehingga kepercayaan menurun terhadap adanya transparansi keuangan di BPN Provinsi Bali.	Pegawai BPN sudah memiliki pemahaman yang memadai mengenai pentingnya Tata Kelola Keuangan, sehingga kepercayaan sudah meningkat terhadap adanya transparansi keuangan di BPN Provinsi Bali.
3.	Edukasi Literasi Keuangan Melalui Zoom.	Pegawai BPN belum sepenuhnya melek finansial. Hal ini ditunjukkan dari hasil kuis kegiatan dengan rata-rata nilai sebesar 60%.	Sebagian besar pegawai BPN sudah mulai melek finansial. Hal ini ditunjukkan dari hasil kuis kegiatan dengan rata-rata nilai sebesar 90%. Terjadi peningkatan sebesar 30%.
4.	Pembuatan Telegram Group.	Kelompok pegawai BPN belum memiliki media untuk saling bertukar informasi terkait webinar gratis akan pentingnya keuangan.	Kelompok pegawai BPN sudah memiliki media untuk saling bertukar informasi terkait webinar gratis akan pentingnya keuangan.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui kegiatan pengabdian ini terdapat peningkatan terhadap akuntabilitas, keterbukaan, dan pemberdayaan pegawai BPN, sehingga pengelolaan keuangan menjadi lebih baik bagi pemerintah daerah dan pegawai BPN. Akuntabilitas dan keterbukaan dalam tata kelola keuangan di mitra kegiatan sudah mulai transparan dan pelaporan juga telah dilaksanakan dengan baik yang didukung adanya informasi lengkap Dengan dilaksanakan evaluasi keuangan secara berkala baik pengeluaran maupun pemasukan yang dimiliki oleh

masing-masing bidang. Sehingga mampu dipertanggung jawabkan dan dilaporkan sesuai dengan pemakaian anggaran pada tata kelola keuangan mitra kegiatan.

Pemberdayaan sebagai kemampuan individu yang bersumber dari manusia berupa kekuatan, peranan, tanggung jawab, serta keterampilan (Nahdliyah & Izzah, 2022). Pemberdayaan pada mitra kerja melalui literasi keuangan berupa sosialisasi dan pemberian poster sudah sangat baik dikarenakan pegawai keuangan secara berkala diberikan pelatihan dan mengikuti kegiatan peningkatan sumber daya manusia dengan baik. Sehingga dengan adanya pemberdayaan dan literasi keuangan, kualitas pegawai semakin meningkat dan mampu membuat pegawai BPN melek finansial.

Terdapat keterbatasan dalam kegiatan pengabdian ini, dimana ketika penyampaian edukasi literasi keuangan melalui zoom tim pengabdian memiliki kendala dalam merekam (*recording*) selama kegiatan berlangsung. Sehingga besar harapan tim pengabdian, kegiatan selanjutnya dapat direkam dengan baik agar pegawai BPN dapat mempelajari kembali hasil diskusi edukasi literasi keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atik Atikah, R. R. K. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan, Locus of Control, dan Financial Self Efficacy Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan (Studi Pada PT. Panarub Industry Tangerang). *Manajemen Bisnis*, 10(2), 284–297.
- Butarbutar, A. H., Lubis, M. Y., Kalo, S., & Sunarmi. (2022). Transparansi dan Akuntabilitas dalam Kebijakan Penentuan Tarif biaya Transportasi dan Akomodasi dalam Pendaftaran Panah Pertama Kali di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2, No. 1, 254–269.
- Chusanudin, A., & Ramadhan, Y. (2022). Peran Etika Sosial Terhadap Pencegahan Kecurangan Laporan Keuangan Dana Desa. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5).
- Deden Sopandi, Oemar, F., & Supeno, B. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rokan Hulu. *Sains Akuntansi Dan Keuangan*, 1, no: 1(1), 37–50. <https://doi.org/10.55356/sak.v1i1.9>
- Fajarudin. (2021). Konsep Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. *In Seminar Nasional Teknologi Edukasi Sosial Dan Humaniora*, 1(1), 662–671.
- Ferizal, A., & Ikhbar, S. (2022). Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Dan Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar. *Serambi Konstruktivis*, 4, No. 2, 64–73.
- Hidayah, A. P. N., Purbawangsa, I. B. A., & Abundanti, N. (2021). Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan Di Kota Denpasar. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 10(7), 672. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2021.v10.i07.p03>
- Ivana, N. Y. N., & Kurniawan, B. (2022). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. *Publika*, 10, no: 3, 995–1008.

- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kecamatan bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Kusuma, M., Narulitasari, D., & Nurohman, Y. A. (2022). Inklusi Keuangan Dan Literasi Keuangan Terhadap Kinerja Dan Keberlanjutan UMKM Disolo Raya. *Among Makarti*, 14(2), 62–76. <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.210>
- Nahdliyah, A., & Izzah, L. (2022). Promosi Jabatan dan Rolling Jabatan/ Mutasi Dalam Pemberdayaan SDM di Ma Al Amiriyyah Blokagung Banyuwangi. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam (JMPID)*, 4, No. 1, 111–123.
- Nasriani, Sudarmi, & Ma'ruf, A. (2021). *Akuntabilitas Pelayanan Sertifikat Tanah Di Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Gowa*. 2, No. 2, 711–727.
- Ningtyas, T. (2018). Kepercayaan Masyarakat (Citizen Trust) Di Badan Pertanahan Nasional (BPN) II Surabaya. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(1), 195–211. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v2i1.1080>
- Paot, N. B. (2022). Kepercayaan Publik, Kualitas Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Di Daerah Bantul). *Jurnal Sosial Ekonomi Bisnis*, 2(1), 27–37. <https://doi.org/10.55587/jseb.v2i1.33>
- Riza Kurniawan, N. (2020). Faktor - Faktor Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2, 15–23.